

**Judul** : Pelaksanaan Haji 2023 Dinilai Buruk: Pelayanan Kudu Diperbaiki  
**Tanggal** : Minggu, 12 November 2023  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 6

## Pelaksanaan Haji 2023 Dinilai Buruk

# Pelayanan Kudu Diperbaiki

**Senayan menilai Kementerian Agama (Kemenag) tidak memiliki solusi dari hasil evaluasi pelaksanaan haji tahun 2023. Dikhawatirkan, adanya tambahan kuota haji di tahun 2024 bakal membuat pelaksanaan ibadah haji lebih buruk dari tahun 2023.**

ANGGOTA Komisi VIII DPR John Kenedi Azis bersyukur Pemerintah Indonesia mendapat kehormatan untuk memperoleh tambahan kuota haji 20 ribu dari Kerajaan Arab Saudi. Dengan demikian, total kuota haji yang dimiliki Pemerintah sebesar 241 ribu jemaah.

Walau demikian, John ragu tambahan kuota haji ini bakal dikelola dengan baik. Sebab, pengalaman haji tahun 2023 lalu saja yang jumlah jemaah hajinya mencapai 229 ribu orang, ternyata ditemukan banyak masalah. Masalah muncul mulai dari pemberangkatan sampai ketika para jemaah tiba di Mekah.

"Ini penting kami ingatkan kepada Pak Menteri (Yaqut Cholil Qoumas) karena jelas kita tidak

mau terjadi lagi permasalahan-permasalahan haji tahun 2023," kata John Kenedi di Jakarta, kemarin.

Bagi politisi Fraksi Golkar ini, pengalaman haji tahun 2023 ini sudah cukup buruk. Bahkan gara-gara buruknya pengelolaan haji tersebut, dirinya sampai dimaki-maki oleh para jemaah ketika menjalankan tugas sebagai Tim Pengawas Haji tahun 2023 di Arab Saudi.

"Sungguh sakit kita, sungguh sangat tidak enak. Ketika kami hadir, datang di (tenda) jemaah-jemaah haji itu sampai kami didamprat, 'mau apa lagi ini anggota dewan datang ke sini, belum puas melihat kami tersiksa'. Sampai segitunya respons dari masyarakat," terangnya.

Karena itu, dia mengingatkan Menteri Yaqut dan jajaran agar persoalan haji tahun lalu tidak boleh lagi kembali terulang di haji tahun 2024. Seluruh tahapan persiapan haji harus benar-benar dilaksanakan dengan baik.

"Saya secara pribadi tidak menghendaki kalau kita ini status (pelaksanaan haji) masih coba-coba. Harus kita persiapkan secara matang. Harus kita persiapkan bagaimana jemaah haji ini berangkat dengan aman, dapat menjalankan ibadah hajinya dengan khusuk," tegasnya.

Anggota Badan Anggaran DPR ini merasa perlu menegur Kementerian Agama mengingat Laporan Keuangan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1444 H/2023 M tidak menggambarkan solusi permasalahan haji.

"Di sisi lain banyak komentar ketika rapat evaluasi haji pertama kita uraikan, tapi (sampai saat ini) tidak ada jalan keluarnya. Saya terus terang saja, saya tidak menghendaki

(persoalan haji tahun 2023) ini, terjadi kembali pada tahun 2024," ujarnya.

John berharap Menteri Yaqut menyampaikan solusi mitigasi terhadap permasalahan haji tahun 2023 sebagai bahan evaluasi haji tahun 2023. "Di laporan itu saya lihat satu per satu tidak ada. Yang ada hanya digambarkan adalah tentang laporan keuangan riil saja yang notabene kami pun tidak bisa membahas poin per poin terhadap laporan dari pak Menteri tersebut," tambahnya.

Sebelumnya Menteri Yaqut melaporkan laporan pertanggungjawaban keuangan operasional penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023. Terdapat saldo akhir per 31 Agustus 2023 sebesar Rp 1,21 triliun lebih. Dari saldo ini akan digunakan untuk memenuhi kewajiban setelah 31 Agustus sampai 31 Desember 2023 sebesar Rp 1,03 triliun. Terdiri dari sisa pembayaran penerbangan Rp 927,4 miliar, premi asuransi dan perlindungan

lain sebesar Rp 2,14 miliar, pembinaan jemaah sebesar Rp 9,6 miliar, pelayanan umum dalam negeri Rp 37,25 miliar, dan pengelolaan BPIH sebesar 27,15 miliar.

Dari jumlah kewajiban yang belum terbayar tersebut, sebagian sudah direalisasikan pembayarannya yaitu penerbangan sebesar Rp 927 miliar, premi asuransi dan perlindungan lainnya Rp 2,14 miliar, realisasi per 31 Oktober Rp 2,08 miliar. "Sehingga masih ada sisa Rp 59 juta," katanya.

Kemudian pembinaan jemaah Rp 9,66 miliar, sementara realisasi Rp 8,76 miliar, dan masih ada sisa Rp 899 juta lebih. Berikutnya, pelayanan umum dalam negeri Rp 37,25 miliar sebagai kewajiban, dan sudah terealisasi Rp 366,5 juta, sehingga masih ada sisa Rp 39,89 miliar.

"Sementara pengelolaan BPIH dafrar kewajibannya Rp 27,15 miliar dan realisasi Rp 20,84 miliar. Sehingga masih ada sisa Rp 6,3 miliar," katanya. ■ KAL